

**ANALISIS PENERAPAN PPN DAN PPh PASAL 22 ATAS
PENGADAAN BARANG PADA BENDAHARAWAN
NEGARA DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN
INVESTASI, KEMENPAREKRAF**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
JAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Mahardika

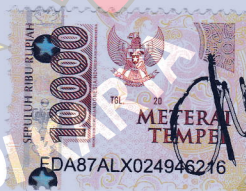
NIM : 190500067

Program Studi : Akuntansi – Strata 1

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri dan seluruh isi skripsi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Apabila saya mengutip karya dari orang lain maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenai sanksi pembatalan skripsi ini apabila terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiplakan).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan semestinya.

Jakarta, Januari 2024



(Dian Mahardika)
190500067

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DIAN MAHARDIKA

NIM : 190500067

JURUSAN : AKUNTANSI

KONSENTRA : PERPAJAKAN

SI

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PPN DAN PPh PASAL 22

SKRIPSI ATAS PENGADAAN BARANG PADA
BENDAHARAWAN NEGARA DEPUTI BIDANG
INDUSTRI DAN INVESTASI, KEMENPAREKRAF

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2024

UJIAN

Jakarta, 16 Februari 2024

Dosen Pembimbing II

Dosen Pembimbing I

Tagor Darius Sidauruk, S.E., M.Si., CRP

Jahormin Simarmata, SE., Ak., M.Ak.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan

GL. Hery Prasetya, S.E., MM., CPHCEP.,
CPMP., CODP., CBOA., CLMA

Christina, S.E., M.Si.

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

ANALISIS PENERAPAN PPN DAN PPh PASAL 22 ATAS

PENGADAAN BARANG PADA BENDAHARAWAN

NEGARA DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN

INVESTASI, KEMENPAREKRAF

OLEH:

NAMA : DIAN MAHARDIKA

NIM : 190500067

Telah dipertahankan di depan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji / Pembimbing I

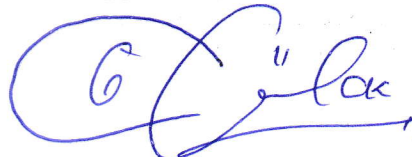
Jahormin Simarmata, SE., Ak., M.Ak.

Anggota Penguji



Heriston Sianturi, SE., MM

Anggota Penguji



Galih Chandra Kirana, SE., M.Ak.

ABSTRACT

State treasurers are treasurers or officials who make payments whose funds come from the State Budget / Regional Revenue and Expenditure Budget consisting of Central and Regional Government Treasurers both Provincial, Regency or City. This study aims to determine the application of Value Added Tax (VAT) and Income Tax (PPh) Article 22 at the Deputy for Industry and Investment, Kemenparekraf carried out by state treasurers related to the procurement of goods.

This research is a qualitative research. The data sources in this study are the results of interviews as primary data and observations of financial accountability files and tax reports of the Deputy for Industry and Investment, Kemenparekraf in 2022 as secondary data. Hypothesis testing used in this study using descriptive analysis.

The results showed that in general (1) the application of VAT on the procurement of goods is in accordance with the existence of two different tariffs in 2022 (Law Number 42 of 2009 and Law Number 7 of 2021), (2) the application of Income Tax Article 22 on the procurement of goods is appropriate, (3) the application of VAT and Income Tax Article 22 on the procurement of goods is sufficiently in accordance with applicable tax regulations, and (4) the compliance of the state treasurer on the application of VAT and Income Tax Article 22 on the procurement of goods is sufficiently in accordance with applicable regulations.

Keywords: *VAT, Income Tax Article 22, State Treasurer, Procurement of Goods.*

ABSTRAK

Bendaharawan negara merupakan bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten ataupun Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf yang dilakukan oleh bendaharawan negara terkait pengadaan barang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara sebagai data primer dan observasi atas berkas pertanggung jawaban keuangan dan laporan perpajakan Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf di tahun 2022 sebagai data sekunder. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum (1) penerapan PPN atas pengadaan barang sudah sesuai dengan adanya dua pengenaan tarif yang berbeda di tahun 2022 (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021), (2) penerapan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang sudah sesuai, (3) penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang sudah cukup sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan (4) kepatuhan bendaharawan negara atas penerapan PPN dan PPh pasal 22 atas pengadaan barang sudah cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: PPN, PPh Pasal 22, Bendaharawan Negara, Pengadaan Barang.